

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada tanggal 26 Juli 1945, diumumkanlah Deklarasi Potsdam untuk Jepang, yang ditandatangani oleh ketiga pemimpin pemerintahan negara Sekutu yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Cina, yang mengisyaratkan bahwa Jepang harus menyerah kepada pasukan sekutu. Terdapat 13 pasal dalam deklarasi ini yang menyatakan kepada Jepang untuk segera mengakhiri perang. Dalam butir ke-13 dari deklarasi ini juga menyatakan bahwa Jepang harus menyerah tanpa syarat, dan pilihan lain bagi Jepang adalah kehancuran total.<sup>1</sup> Sehari kemudian sampailah deklarasi ini kepada pemerintah Jepang. Tetapi pemerintah Jepang tidak menerima deklarasi ini, sehingga pasukan sekutu mengambil tindakan tegas dengan menjatuhkan bom atom untuk pertama kalinya di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 yang mengakibatkan kurang lebih tiga ratus ribu orang menjadi korban dan di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945 dengan korban lebih dari empat puluh ribu jiwa untuk yang kedua kalinya. Melihat situasi ini barulah Jepang menyadari benar apa yang dimaksud dengan kehancuran total pada butir ke-13 Deklarasi Potsdam tersebut.

Pada tanggal 10 Agustus 1945, Jepang menyampaikan penyerahan mereka. Penyerahan ini menyatakan bahwa Jepang bersedia untuk menerima deklarasi Potsdam tetapi dengan pengertian bahwa deklarasi tersebut tidak terdiri dari permintaan apapun yang merugikan hak istimewa Kaisar sebagai pemerintahan tertinggi.<sup>2</sup> Pada tanggal 11 Agustus, atas nama Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, dan China, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat menyampaikan balasan atas permintaan Jepang, yang menyatakan bahwa sejak masa penyerahan, wewenang Kaisar dan Pemerintah Jepang dalam menjalankan pemerintahan akan

---

<sup>1</sup> Edwin O. Reischauer, *The United States and Japan* (Cambridge, 1957), hlm.340

<sup>2</sup> Occupation of Japan, Policy and Progress (New York, 1969), hlm.4

tunduk kepada Panglima Tertinggi Pasukan Pendudukan Sekutu yang akan mengambil langkah yang dianggap perlu untuk menjalankan syarat-syarat penyerahan. Hal ini mengindikasikan penolakan dari pihak Sekutu atas permintaan Pemerintah Jepang.

Melihat situasi seperti ini dan dengan propaganda Amerika Serikat yang akan membumihanguskan kota-kota di Jepang, akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1945, Kaisar memutuskan untuk menerima Deklarasi Postdam ini dan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Maka diumumkanlah melalui radio-radio pada tanggal 15 Agustus 1945 berita mengenai berakhirnya perang.

Jendral Douglas MacArthur yang ditunjuk oleh Presiden Amerika Serikat, Harry Truman, sebagai Panglima Tertinggi Pasukan Pendudukan Sekutu atau *Supreme Commander of the Allied Powers (SCAP)* atau *Rengō Kokugun Saikō Shireikan* (連合軍最高司令官) menerima secara resmi penyerahan Jepang pada tanggal 2 September 1945 di atas kapal Missouri di Teluk Tokyo. Dokumen penyerahan ini menetapkan penerimaan secara penuh dan pelaksanaan dari Deklarasi Potsdam, penyerahan tanpa syarat pasukan bersenjata Jepang, pelaksanaan seluruh perintah SCAP oleh pemerintah Jepang dan pasukan bersenjata Jepang, pembebasan seluruh tahanan Sekutu, dan pengakuan dari Kaisar bahwa dia dan pemerintahannya tunduk kepada perintah Sekutu.<sup>3</sup> Penandatanganan dokumen penyerahan ini dari pihak Jepang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Jepang Mamoru Shigemitsu dan Jendral Umezu Yoshijiro (Kepala Staf Angkatan Darat Jepang); Jendral Douglas MacArthur selaku Pimpinan Tertinggi Pasukan Pendudukan Sekutu; Laksamana Tertinggi Angkatan Laut C. W Nimitz dari Amerika Serikat; Jendral Hsu Yung Chang selaku Menteri Pertahanan dari Cina; Laksamana Bruce Fraser dari Inggris; Letnan Jendral Kuzma Darevyanko dari Uni Soviet; Panglima Tertinggi Pasukan Militer Australia, Thomas Albert Blamey; Kolonel Lawrence Moore Cosgrave dari Kanada; Jendral Philippe Leclerc dari Prancis; Mayor Conrad Emil Lambert Helfrich dari Belanda; dan Leonard Monk Isitt dari Selandia Baru.

Sekutu mulai merencanakan untuk membagi wilayah kekuasaan Jepang dalam rangka melaksanakan proses pendudukan. SCAP atau Panglima Tertinggi

---

<sup>3</sup> *ibid*, hlm.62

Pasukan Pendudukan Sekutu memiliki kendali penuh atas empat pulau utama di Jepang yaitu Honshu, Hokkaido, Shikoku, dan Kyushu. Selanjutnya, kekuasaan atas pulau-pulau di sekitarnya dipegang oleh :

1. Uni Soviet : Korea Utara, Sakhalin, dan kepulauan Kuril
2. Amerika Serikat : Korea Selatan, Okinawa, pulau Amami, pulau Ogasawara, dan wilayah pendudukan Jepang di Micronesia.
3. Cina : Taiwan dan Penghu.

Dengan menyerahnya Jepang kepada Sekutu, Jepang tidak lagi mempunyai kedaulatan untuk menjalankan kehidupannya ke dalam maupun ke luar. Jepang menjadi bangsa yang tidak dapat lagi mengatur kehidupan rakyatnya, bahkan telah kehilangan haknya untuk menentukan nasibnya sendiri. Pasukan Sekutu lah yang akhirnya menentukan batasan kekuasaan kepada bangsa Jepang untuk turut campur dalam menentukan nasib mereka sendiri. Secara langsung seluruh kebijakan yang dijalankan di Jepang berada dibawah kekuasaan Sekutu. Komisi Timur Jauh atau *Far Eastern Commission (FEC)* atau *Kyokutō Iinkai* (極東委員会) dan Dewan Sekutu atau *Allied Council for Japan* atau *Tainichi Rijikai* (対日理事会) juga didirikan untuk menangani pendudukan di Jepang. Di bawah Panglima Tertinggi Pasukan Pendudukan Sekutu, Jenderal Douglas MacArthur, diterapkanlah kebijakan-kebijakan yang berasal dari negara Sekutu.

Dalam kurun waktu tujuh tahun sejak Jepang menyatakan penyerahannya kepada sekutu sampai pada berakhirnya pendudukan Sekutu pada tahun 1952, banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan pendudukan. Salah satunya adalah demokratisasi di berbagai bidang. Hal ini dilakukan untuk menciptakan persamaan hak dan kewajiban yang lebih baik di Jepang. Salah satu bidang yang menjadi perhatian sekutu adalah pendidikan. Sejak tahun 1930-an, sistem pendidikan Jepang yang dijalankan merupakan sistem yang mempersiapkan generasi-generasi muda untuk berperang dalam usaha Jepang mengekspansi atau menguasai negara-negara tetangganya.<sup>4</sup> Oleh karena itu, untuk menjamin keamanan dunia dari usaha-usaha Jepang menguasai negara lain dan untuk menjamin penduduk Jepang untuk mendapatkan kebebasan di dalam pendidikan, maka disusunlah kebijakan-kebijakan dalam bidang pendidikan oleh pemerintah

<sup>4</sup> Frederica M. Bunge, *Japan a country study* (Washington, 1982), hlm.97

pendudukan.<sup>5</sup> Pendidikan merupakan salah satu bidang yang mengalami perubahan-perubahan akibat adanya kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pendudukan.

Berdasarkan dokumen penyerahan yang ditandatangani di Teluk Tokyo, kekuasaan Kaisar dan Pemerintah Jepang untuk memerintah negara selanjutnya ditentukan oleh Panglima Tertinggi Pasukan Pendudukan Sekutu atau SCAP (butir ke delapan dokumen penyerahan Jepang yang ditandatangani di Teluk Tokyo tanggal 2 September 1945). Pemerintah Jepang dalam kedudukannya sebagai pihak yang kalah perang, secara de facto tidak memiliki kekuasaan untuk menentukan kebijakan yang akan diterapkan di dalam negara mereka. Pemerintah Jepang yang dimaksud adalah pemerintah Jepang yang berkuasa dari tahun 1945 sampai tahun 1952, dengan beberapa pergantian kepemimpinan akibat adanya pembersihan yang dilakukan pasukan pendudukan dan pemilihan umum yang berlangsung pada tahun 1946 dengan Yoshida Shigeru sebagai Perdana Menteri terpilih. Kekuasaan di Jepang secara penuh dikendalikan oleh Sekutu. Sekutu mendirikan FEC atau *Far Eastern Commission* yang berkedudukan di Washington sebagai badan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang diterapkan di Jepang. Selain itu ada juga *Allied Council* yang berfungsi untuk memberikan saran kepada SCAP selaku pelaksana kebijakan di Jepang. Kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh FEC kemudian disampaikan kepada SCAP dengan perantara Amerika Serikat. SCAP kemudian secara langsung akan meneruskannya kepada pemerintah Jepang. Kemudian SCAP yang mengatur wewenang pemerintah Jepang dalam tiap kebijakan tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang ini, saya bermaksud untuk melihat lebih dalam peran pemerintah Jepang di dalam kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pendudukan Sekutu khususnya dalam bidang pendidikan.

## 1.2 Perumusan Masalah

Yang dijadikan permasalahan di dalam skripsi ini adalah peran pemerintah Jepang dalam kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pendudukan Sekutu

---

<sup>5</sup> Edwin O. Reischauer, *op. cit.*, hlm.264

khususnya dalam bidang pendidikan pada masa pendudukan Sekutu tahun 1945 sampai berakhirnya masa pendudukan tahun 1952.

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memaparkan peran pemerintah Jepang di dalam kebijakan yang diterapkan pemerintah pendudukan Sekutu dalam bidang pendidikan pada masa pendudukan sejak tahun 1945 sampai 1952.

### **1.4 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penulisan skripsi ini mencakup peristiwa yang terjadi pada tahun 1945 hingga tahun 1952 pada masa pendudukan sekutu di Jepang khususnya mengenai peran pemerintah Jepang di dalam kebijakan Sekutu dalam bidang pendidikan .

### **1.5 Metode Penulisan**

Skripsi ini merupakan hasil penelitian sejarah dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Sumber-sumber dikumpulkan dengan menggunakan telaah kepustakaan seperti buku-buku sumber acuan, jurnal maupun artikel-artikel yang berkaitan dengan topik permasalahan yang didapat dari perpustakaan-perpustakaan maupun koleksi pribadi. Selain itu, sumber data juga didapat dari internet.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Skripsi ini dibagi menjadi 4 bab dan masing-masing bab dibagi menjadi beberapa subbab untuk lebih merinci penjelasan. Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup, metode penulisan, dan sistematika penulisan. Bab dua mengenai pelaksanaan kebijakan pendudukan Sekutu. Bab tiga merupakan pembahasan mengenai peran pemerintah Jepang dalam bidang pendidikan pada masa pendudukan Sekutu tahun 1945-1952. Bab empat merupakan kesimpulan dari perumusan masalah skripsi ini.